



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO TEKKNIS DAN HUPMAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIATNA
2. Jabatan : WAKIL KEPALA BIRO TEKKNIS DAN HUPMAS
3. NHK : 242228

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.706.371.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m²/178 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.204.975.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/180 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 501.396.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HADIAH Rp. 16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.200.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.419.558

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.877.490.558

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.877.490.558

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.